

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 14 TAHUN
2013 TENTANG JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN SEKADAU
DI DESA PENITI KECAMATAN SEKADAU HILIR
KABUPATEN SEKADAU**

**Oleh:
DICKY KUSUMAATMAJA
NIM. E42010064**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Email : dickykusumaatmaja@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah bahwa faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi sangat mempengaruhi efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir, sehingga dibutuhkan perbaikan pada setiap indikator, seperti pemberian materi tentang tugas pokok dan fungsi implementor, perbaikan komunikasi dan penyebaran informasi, peningkatan kualitas kerja, dan pengawasan dalam pelaksanaan mekanisme program.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

IMPLEMENTATION OF PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 14
TAHUN 2013 ABOUT SEKADAU HEALTH INSURANCE IN PENITI VILLAGE
SEKADAU HILIR SUB DISTRICT

By:
DICKY KUSUMAATMAJA
NIM. E42010064

Abstract

Study Program of government science cooperation between West Borneo
Government with Faculty of Social and Political Science University of Tanjungpura.

Email : dickykusumaatmaja@yahoo.co.id

This research aims to make a description and analyze effectivity of implementation of Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 about Sekadau Health Insurance in Peniti Village Sekadau Hilir Sub district. Type of research is description by qualitative approach by data collection techniques are using interview technique, observation technique, and documentation technique. Result of this research is communication factor, resources factor, disposition factor and bureaucracy structure greatly affect the effectivity of implementation of Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 about Sekadau Health Insurance in Peniti Village Sekadau Hilir Sub district, so that needed improvement in every indicators, such as matery given about main tasks and implementors function, improvement in communication and information deployment, improvement in job quality and supervision in program running mechanism.

Key Words: Implementation of wisdom, Communication, Resource, Disposition, and Bureaucracy structure

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan peningkatan pelayanan sosial, termasuk di bidang kesehatan salah satunya dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (UU Nomor 40 Tahun 2004), untuk itu pelayanan kesehatan sendiri sudah menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak diperlukan masyarakat saat ini, karena kita sadari setiap orang pasti memiliki resiko untuk sakit tidak peduli dia orang kaya, orang miskin, pejabat pemerintah, sampai pada masyarakat biasa. Peningkatan pelayanan sosial dilakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban Negara yaitu untuk menjamin hidup, memberikan pelayanan kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan (UUD 1945 dan Amandemen:36), dan Pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (UUD 1945 dan Amandemen: 42).

Jaminan pelayanan kesehatan yang ada saat ini lebih terpusat di daerah perkotaan belum merata kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat di daerah-daerah terpencil dan pedalaman seperti di Kabupaten Sekadau. Melihat pentingnya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, maka Pemerintah tetap berusaha untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk di daerah pedalaman dengan membentuk program Jaminan Kesehatan Daerah atau yang disingkat Jamkesda. Jamkesda merupakan jaminan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten atau Kota. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/ Menkes/ Per/ V/ 2011 tentang pedoman pelaksanaan jaminan

kesehatan masyarakat ditetapkan apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat maka masyarakat miskin tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Begitu halnya pada Kabupaten Sekadau jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu belum seluruhnya terlayani melalui program Jamkesmas, maka menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sekadau lah yang harus bertanggung jawab agar seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Sekadau dapat merasakan jaminan kesehatan yang sama, dengan membuat suatu kebijakan demi menjamin pelayanan kesehatan yaitu Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau (JPKS).

Peningkatan Pelayanan Kesehatan merupakan tujuan utama dari terbentuknya kebijakan program JPKS, memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat miskin dan kurang mampu yang tidak terdaftar di dalam Jamkesmas. Hal ini dilakukan

demi meningkatkan pembangunan dan taraf kesejahteraan rakyat terutama di bidang kesehatan. Dalam menerapkan kebijakan ini tentunya harus memiliki persiapan yang matang dan mendalam oleh pemerintah daerah baik dari sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan program ini. Kebijakan Peraturan Bupati ini terhitung baru yaitu pada bulan Juli 2013 sehingga dari segi pelaksanaannya masih harus di perhatikan apakah sesuai dengan harapan pemerintah atau belum.

Peneliti melihat bahwa pelaksanaan program JPKS pada Desa Peniti masih terdapat masalah yaitu diantaranya masih terdapat masyarakat yang tidak terdaftar menjadi peserta JPKS, hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada masyarakat yang kurang mengerti tentang telah berlakunya kebijakan baru ini, tahapan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi, kemudian siapa saja yang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan ini, sehingga pelaksanaan program JPKS ini belum sesuai dengan tujuan kebijakan, atau belum efektif.

Perlu adanya perhatian yang serius tentang Implementasi Kebijakan JPKS, maka oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi permasalahan didalam pelaksanaan JPKS di Desa Peniti tersebut.

2. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan pokok didalam penelitian ini adalah “Mengapa Implementasi Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau (JPKS) Di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau belum efektif ?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas Implementasi Program Jaminan Pelayanan Kesehatan

Sekadau (JPKS) Di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran di bidang akademik mengenai implementasi kebijakan sehingga dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya study ilmu kebijakan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk disempurnakan, selain itu agar dapat digunakan dan diterapkan.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan

tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster adalah sebagai berikut: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Webster (dalam Wahab, 2006:64). Pengertian implementasi selain menurut kamus Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter

dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Meter dan Horn (dalam Wahab, 2006:65).

Berdasarkan definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, peneliti menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan agar dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan

oleh Edward III, yang membagi implementasi kebijakan kedalam empat faktor atau variabel.

Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*. Widodo(2007:96).

1. Komunikasi (*Communication*)

Pertama faktor komunikasi yaitu bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan publik, Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan.

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Widodo (2007:97).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Edward III (dalam Widodo, 2007:98) mengemukakan bahwa: “Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan situasi tertentu yang berlangsung di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir tentang implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data saat penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian disini adalah sebagai pelaku, yang didalam implementasi kebijakan adalah manusia, baik yang berperan sebagai pelaksana atau sasaran

kebijakan/masyarakat. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Camat Sekadau Hilir, Staf Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau, Kepala Desa Peniti, Kepala Urusan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Dusun, dan masyarakat setempat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Komunikasi

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pada faktor komunikasi didalam

implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau belum terlaksana secara optimal hal tersebut dikarenakan proses penyebaran informasi yang masih sangat kurang dengan menggunakan media sosialisasi hanya satu kali semenjak kebijakan ini disahkan, kurangnya penggunaan media lain juga menjadi alasan mengapa penyebaran informasi yang dilaksanakan di Desa Peniti tidak berjalan dengan optimal sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang kebijakan dan program baru ini dan belum mendaftar menjadi peserta program Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau.

2. Analisis Sumber Daya

Faktor sumberdaya mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bupati Sekadau No. 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti. Pertama pada indikator sumberdaya manusia atau staf untuk

melaksanakan program dengan baik dari segi kuantitas atau jumlah aparatur staf Desa Peniti sudah cukup dilihat dari setiap bagian-bagian yang tersediakan, untuk urusan pelayanan jaminan kesehatan dilimpahkan kepada Kepala Urusan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Peniti.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa Sumber daya, baik sumber daya manusia, fasilitas, sampai pada informasi dan wewenang masing-masing memiliki peran yang penting mendukung dan berkaitan antara satu dan lainya dalam pencapaian efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir. Kualitas Sumber daya manusia yang belum maksimal, fasilitas infrastruktur bangunan yang sudah cukup baik namun tidak didukung dengan ketersediaan obat-obatan yang baik juga merupakan kelemahan pelaksanaan program ini, penyebaran informasi yang kurang baik juga

merupakan kekurangan pemerintah yang harus diperbaiki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada faktor sumberdaya yang terdapat di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir masih kurang didalam mengoptimalkan Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir.

3. Analisis Disposisi

Sikap implementor akan menjadi kunci keberhasilan suatu program karena tujuan awal dari dibuatnya suatu kebijakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, pelayanan yang baik tadi akan tercipta apabila dilakukan dengan sikap atau perilaku yang baik pula.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa faktor disposisi, sikap dan perilaku implementor pada Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir sudah

cukup tepat. Melihat dari kepuasan yang disampaikan oleh masyarakat atau peserta jaminan pelayanan kesehatan yang melakukan perawatan, namun tetap memerlukan perbaikan atau peningkatan terutama didalam meningkatkan komitmen kerja implementor maupun rasa tanggung jawab terhadap tugas.

4. Analisis Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi pada Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa

Peniti Kecamatan Sekadau Hilir pada mekanisme yang dijalankan oleh program jaminan pelayanan kesehatan sekadau sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan *Standard operational procedure* (SOP) yang digunakan. mekanisme yang tidak terlalu berbelit-belit juga menjadi kunci terlaksananya program secara baik. Struktur birokrasi pada Desa Peniti sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik jumlah aparatur maupun bidang yang ditempati atau dengan kata lain tidak terjadi penumpukan tugas atau kekosongan jabatan. Namun dalam pelaksanaan tugas terutama dalam implementasi peraturan Bupati di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir masih perlu pelatihan maupun pengawasan dari Pemerintah Daerah Sekadau, khususnya Kecamatan Sekadau Hilir.

D. SIMPULAN

1. Simpulan

Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti

Kecamatan Sekadau Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan untuk melihat efektifitas implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan indikator-indikator yang terdapat pada faktor komunikasi bahwa komunikasi yang dijalankan didalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir masih kurang terutama dari segi kuantitas komunikasi yang masih sedikit yaitu hanya satu kali melakukan sosialisasi yang hanya melibatkan Kepala Desa. Kwantitas komunikasi yang sedikit inilah yang mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan atau program ini sehingga wajarlah jika peserta

yang ikut berpartisipasi didalam program ini sangat sedikit, belum lagi informasi yang diberikan didalam sosialisasi tadi terhenti hanya sampai pada Kepala Desa.

2. Sumberdaya yang disediakan pemerintah didalam pelaksanaan program merupakan faktor kedua yang harus diperhatikan untuk melihat efektifitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir, faktor sumberdaya terbagi menjadi empat indikator yaitu sumberdaya manusia, fasilitas, wewenang dan informasi. Sumberdaya manusia yang terdapat pada desa peniti dari segi kuantitas atau jumlah aparatur sudah cukup namun dari segi kualitas pendidikan aparatur masih belum standar. Pada indikator fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pelaksana kebijakan sudah cukup baik terutama fasilitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau hanya saja ketersediaan

obat-obatan yang masih kurang. Selanjutnya wewenang dan informasi yang berkaitan dengan program harus dapat tersampaikan dengan baik pada peserta ataupun masyarakat tidak terhenti hanya pada penempelan kertas pengumuman didinding kaca kantor desa saja.

3. Disposisi atau sikap merupakan faktor selanjutnya didalam melihat efektifitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir. Disposisi atau sikap yang diberikan implementor terhadap sasaran kebijakan atau peserta jaminan pelayanan kesehatan sudah sangat baik melihat dari kepuasan yang disampaikan oleh masyarakat atau peserta jaminan pelayanan kesehatan yang melakukan perawatan.
4. Struktur birokrasi terutama pada mekanisme yang dijalankan oleh program Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau sudah berjalan

dengan baik dan sesuai dengan *Standard operational procedure* (SOP) yang digunakan. mekanisme yang tidak terlalu berbelit-belit juga menjadi kunci terlaksananya program secara baik. Struktur birokrasi pada desa peniti sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik jumlah aparatur maupun bidang yang ditempati atau dengan kata lain tidak terjadi penumpukan tugas atau kekosongan jabatan. Namun dalam pelaksanaan tugas terutama dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir masih perlu pelatihan maupun pengawasan dari Pemerintah Daerah Sekadau khususnya Kecamatan Sekadau Hilir.

E. SARAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dan setelah peneliti mengambil kesimpulan tentang masalah yang dihadapi terhadap implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14

Tahun 2013, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan komunikasi terutama informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program jaminan pelayanan kesehatan sekadau, kwantitas sosialisasi yang dilakukan sebelumnya harus ditambah. Sosialisasi tidak hanya diperuntukan bagi pelaksana kebijakan saja, namun sasaran kebijakan seperti masyarakat umum juga perlu diikuti sertakan agar sosialisasi yang dilakukan tidak hanya putus atau berahir pada aparatur desa namun pada seluruh masyarakat desa begitupula dengan pemanfaatan media-media lain seperti brosur, spanduk dan Koran juga diperlukan didalam penyebaran informasi tentang kebijakan peraturan bupati tersebut.
2. Sumberdaya yang terdapat dalam implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau di Desa

Peniti Kecamatan Sekadau Hilir dapat lebih ditingkatkan dengan menambah fasilitas-fasilitas yang menunjang seperti alat-alat medis, ambulance, dan obat-obatan. Kemudian peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada Desa Peniti dengan mengadakan pelatihan khusus, dan menambah kuantitas atau jumlah petugas kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau.

3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan karena dipandang sudah cukup baik peneliti hanya dapat member saran agar sikap baik tersebut dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. kepada pemerintah daerah sebagai perancang kebijakan agar dapat memberikan motivasi terhadap para implementor agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat selaku peserta program.
4. Mekanisme yang baik akan terlaksana apabila terdapat

kesadaran dari setiap pihak yang terlibat baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan, semakin baik partisipasi masyarakat maka tujuan kebijakan akan semakin dapat tercapai. disinilah peran pengawasan dari pemerintah daerah harus dijalankan, agar mekanisme yang sudah disusun dengan baik tadi tidak melenceng atau menyalahi tujuan awal dibentuknya kebijakan pemerintah daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Agustino, Leo.2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Creswell, John W, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusnadi, Moh Dan Saragih, Bintan R. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut System Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pt Gramedia.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono, AG.2006. *Analisis Kebijakan Public, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarto, Budi. 2012. *Kebijakan Public Teori, Proses Dan Study Kasus*. Yogyakarta: Caps.

Dokumen-Dokumen:

Monografi Kecamatan Sekadau Hilir tahun 2013

Data dari BPS Kabupaten Sekadau tahun 2013

Profil Desa Peniti Tahun 2013

Dokumen-Dokumen Desa Peniti (daftar peserta JPKS)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Dan Amandemen

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Sekadau.

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Desa

Website:

Sasmita, Nadia. 2013. **Kebijakan Publik**, Melalui <[http://www.academia.edu/4694245 / Pengertian Jenis-jenis dan Tingkat tingkat Kebijakan Publik](http://www.academia.edu/4694245/Pengertian-Jenis-jenis-dan-Tingkat-tingkat-Kebijakan-Publik)>. (3/1/2014).

Airu, (2012), **Implementasi Kebijakan**, melalui <[http://www. arena. kami./implementasi - kebijakan - george- edward.html](http://www.arena.kami.implementasi-kebijakan-george-edward.html)>. (3/1/2014).

Skripsi:

Fera Wahyuni tahun 2012 dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kota Balikpapan*”

Novayanti Sophia Rukmana.S tahun 2013 dengan judul “*Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis*”

Daerah Di Puskesmas Sumbang

Kecamatan Curio Enrekang”.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dicky Kusumaatmaja

NIM / Periode Lulus : E42010064 / 2014

Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP : dickykusumaatmaja@yahoo.co.id / 089627387471

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN SEKADAU DI DESA PENITI KECAMATAN
SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui

Pengelola Jurnal

18/11/2014

Dibuat di : Pontianak

Pada Tanggal : 11 November 2014



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

(DICKY KUSUMAATMAJA)